

**Analisis Perencanaan dan Penganggaran dalam Pembangunan  
(Studi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pekerjaan  
Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Tahun 2018)**

**Puji Wiyono<sup>1</sup>; Ayuning Budiati<sup>2</sup>; Milwan<sup>3</sup>**

Universitas Terbuka<sup>1</sup>; Universitas Sultan Ageng Tirtayasa<sup>2</sup>; Universitas Terbuka<sup>3</sup>

Email: Pujiwiyono24@gmail.com<sup>1</sup>; ayoekomara@gmail.com<sup>2</sup>;  
milwan@ecampus.ut.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini tidak dilihat dari konteks politik dan hanya melihat dalam konteks administrasi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan prosedur pengumpulan data primer, data sekunder dan data yang diperoleh dari observasi dengan telaah dokumen perencanaan dan penganggaran maupun dokumen yang terkait dengan penelitian ini, dengan instrumen penelitian wawancara (*interview*) dan kuesioner dilakukan untuk menentukan bobot prioritas faktor-faktor konsistensi perencanaan dan penganggaran pada DPUTR Kota Tarakan. pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan matrik konsolidasi perencanaan dan Penganggaran (MKPP). Selanjutnya Faktor-faktor konsistensi akan di dianalisa melalui AHP (*Analytical Hierarchy Process*) untuk menentukan bobot prioritas setiap parameter faktor-faktor konsistensi perencanaan dan penganggaran. Temuan penelitian dari hasil matrik konsolidasi perencanaan dan Penganggaran (MKPP) pada perencanaan pembangunan daerah ditemukan inkonsistensi atau tingkat konsistensi yang sangat buruk dengan tingkat konsistensi 0% (inkonsistensi 100%) pada misi DPUTR dengan misi RPJMD Kota Tarakan, sementara tingkat konsistensi tertinggi pada visi DPUTR dengan visi RPJMD Kota Tarakan dengan tingkat konsistensi 100% (inkonsistensi 0%). Lebih lanjut pada konsistensi program kegiatan tertinggi pada dokumen RPJMD dengan Renstra yaitu sebesar 88% (tingkat inkonsistensi 12%) dengan katagori sangat baik, sementara tingkat konsistensi terendah program kegiatan pada dokumen Renstra DPUTR dengan Renja DPUTR sebesar 31% (inkonsistensi 69%) dengan katagori buruk.

Kata Kunci: Konsistensi, Inkonsistensi, Perencanaan, Penganggaran.

**ABSTRACT**

*This research is not seen from the political context and only looks at the administrative context using qualitative descriptive methods with primary data procedures, secondary data and data obtained from observation by reviewing planning and budgeting documents or documents related to this research, with research documents (interview ) and a questionnaire was conducted to determine the priority weight of the planning and budgeting consistency factors of the Tarakan City DPUTR. The selection of informants was carried out by purposive sampling. Furthermore, the data analysis technique used the planning and budgeting matrix (MKPP). Consistency factors will be analyzed through the AHP (Analytical Hierarchy Process) to determine the priority weights of each parameter of planning and budgeting consistency factors. Research findings from the results of the planning and budgeting matrix (MKPP) in regional development*

*planning have found inconsistencies or levels of consistency that are strong. poor with a consistency level of 0% (100% inconsistency) in the DPUTR mission with the Tarakan City RPJMD mission, while the highest level of consistency was in the DPUTR's vision with the Tarakan City RPJMD vision with a consistency level of 100% (0% inconsistency). Furthermore, the consistency of the highest activity program in the RPJMD document with the Strategic Plan is 88% (inconsistency level 12%) with a very good category, while the lowest level of consistency of activity programs in the DPUTR Strategic Plan document with the DPUTR Renja is 31% (69% inconsistency) with a bad category .*

*Keywords: Consistency, Inconsistency, Planning, Budgeting.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan di Negara Indonesia memiliki tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan daerah merupakan basis dan pondasi dari terbentuknya pemerintahan di suatu wilayah administrasi suatu negara. Pembangunan Daerah semakin gencar digaungkan sejak era otonomi daerah dengan tujuan utama terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera termasuk Pembangunan Daerah di Kota Tarakan. Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan (1) Pendapatan masyarakat (2) Kesempatan kerja (3) Lapangan berusaha (4) Akses dan kualitas pelayanan publik dan (5) Daya saing Daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selanjutnya menurut Oekan dkk (2019 : 4) pembangunan dapat didefinisikan sebagai proses mengubah alam dan dunia sosial-ekonomi yang memungkinkan orang mencapai potensi-potensi kemanusiannya melalui sarana-sarana ekonomi-politik. Menurut Permendagri 86 tahun 2017 Bab I pasal 1 ayat (21) pembangunan daerah adalah “Usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya”.

Sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pengelolaan pembangunan sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangannya secara hukum, maka kesejahteraan masyarakat di daerah niscaya lebih cepat tercapai dari kondisi ini, maka perencanaan pembangunan mempunyai arti yang esensial. Perencanaan dan penganggaran daerah Kota Tarakan terefleksi dari beberapa dokumen (1) rencana pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD (UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 263-264) dan (2) rencana perangkat daerah yang terdiri dari rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja), (UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 272-273).Selanjutnya untuk dokumen anggaran daerah adalah RAPBD dan APBD sedangkan untuk perangkat daerah adalah RKA dan DPA perangkat daerah.

Menurut Reni Lestari, 2016 Terkait tentang perencanaan dan penganggaran, Mendagri Cahyo Kumolo berpendapat : “Setidaknya ada lima masalah krusial pemerintah daerah selama 2016, yang pertama, rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah.Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Ketiga, konsistensi dokumen perencanaan dan pengangguran tahunan daerah. Keempat, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai," kata Tjahjo dalam Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2016)”. Mengutip pendapat Mendagri (Cahyo Kumolo), bahwa banyak daerah yang mengalami permasalahan “konsistensi dokumen perencanaan dan pengangguran tahunan daerah termasuk Kota Tarakan, hal ini terlihat seperti kurang maksimalnya capaian kinerja DPUTR jika dilihat dari sisi perencanaan dan penganggaran dari sisi konsistensi jika kita melihat dari matrik konsolidasi antara Renja dan DPA DPUTR tahun 2018 seperti pada tabel 1.

Dari tabel 1, dapat diketahui bahwa terjadi inkonsistensi perencanaan dan penganggaran di DPUTR Kota Tarakan terlihat pada data tersebut diatas bahwa di dalam DPA tahun 2018 terdapat program kegiatan yang tidak sesuai dengan renja DPUTR yaitu sebanyak 35 program kegiatan (44.30%) dan kegiatan di dalam DPA DPUTR sesuai dengan Renja DPUTR sebanyak 44 program kegiatan (sebesar 55.70%).Selanjutnya jika melihat dari laporan realisasi Fisik dan keuangan perangkat daerah, anggaran dengan porsi terbesar pada tahun 2018 terdapat dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan yaitu seperti pada tabel 2.

Dari tabel 2, DPUTR merupakan perangkat daerah pegampu prioritas misi ke 3 Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam melaksanakan Visi dan Misi dalam mewujudkan Tarakan sebagai kota perdagangan, jasa, industri, perikanan, dan pariwisata didukung oleh sumber daya manusia serta infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan.

Melihat dari penelitian terdahulu Agus Sugiarto dan Dyah Mutiarin (2017:2) bahwa pentingnya penelitian dengan tema yang sama adalah “Konsistensi menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat bahwa dalam penganggaran harus berlandaskan pada basis perencanaan yang kuat dan kemudian, konsistensi akan menghindari terputusnya mata rantai (missing link) antara akumulasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sudah tertuang pada PIWK dan RKPD dengan produk penganggarnya”

Selanjutnya dalam penelitian ini penting dilakukan karena mengingat masalah konsistensi perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu permasalahan banyak pemerintah daerah di Indonesia sesuai dengan pendapat Cahyo Kumulo, tetapi juga sesuai data empiris hal ini terjadi di Tarakan inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Locus penelitian dalam penelitian ini adalah DPUTR Pemerintah Kota Tarakan, Kalimantan Utara yang sebelumnya belum pernah dilakukan dengan judul penelitian yang sama, sementara itu penelitian terdahulu dengan locus penelitian yang berbeda.

Selanjutnya melihat uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran DPUTR Kota Tarakan (2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran DPUTR Kota Tarakan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan design penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Menurut (Moleong 2012: 6) bahwa penelitian deskriptif berkaitan dengan penggambaran suatu situasi atau gejala tertentu secara terperinci penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mencoba untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah menurut".Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Azuar Juliandi, Irfan, Saprihal Manurung (2014 : 8) adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowboling teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif membutuhkan inkuiri dengan menggunakan pertanyaan umum terbuka. Alih-alih mengumpulkan dan menganalisis data numerik, peneliti mengumpulkan data tekstual dari partisipan penelitian untuk menemukan tema menggunakan penalaran subjektif (Creswell in Zulkarnaen, Wandy. et al. 2003:2475).

Penelitian ini tidak dilihat dari konteks politik dan hanya melihat dalam konteks administrasi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan prosedur pengumpulan data melalui pengumpulan data primer, data sekunder dan data yang diperoleh dari observasi dengan telaah dokumen secara menyeluruh baik dokumen perencanaan dan penganggaran maupun dokumen yang terkait dengan penelitian ini, dengan instrumen penelitian wawancara (interview) terhadap responden yang terkait dengan bidang perencanaan dan penganggaran DPUTR selanjutnya instrumen kuesioner dilakukan untuk mendukung klasifikasi tingkat kepentingan alternatif faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran pada DPUTR Kota Tarakan. Lebih lanjut pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dari para tokoh yang membidangi perencanaan dan penganggaran.

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan matrik konsolidasi perencanaan dan Penganggaran (MKPP) dengan mensinkronkan program dan kegiatan secara nomenklatur. Dari hasil MKPP diketahui tingkat inkonsistensi/konsistensi selanjutnya dilakukan in dept interview untuk mengetahui akar permasalahan dan faktor-faktor konsistensi dan alternatif- alternatif perbaikan kebijakan yang akan dianalisa dengan literatur penelitian sebelumnya. Hasil alternatif kebijakan akan di dianalisa melalui AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk menentukan bobot prioritas setiap parameter faktor-faktor konsistensi perencanaan dan penganggaran yang menjadi

acuan/penimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan atau rekomendasi kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Penelitian ini tidak dilihat dari konteks politik dan hanya melihat dalam konteks administrasi selanjutnya konsistensi perencanaan dan penganggaran dipandang penting supaya pembangunan fisik sarana dan prasarana yang diampu DPUTR dapat secara terencana, terarah, komprehensif dan berkelanjutan. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang sebagai pedoman dan pemberi arah pembangunan fisik sarana prasarana di Kota Tarakan oleh DPUTR. Perencanaan yang dimaksudkan mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah daerah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD). Sementara itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik menuntut komitmen dan konsistensi dari seluruh stakeholder penyelenggara pemerintahan daerah dalam menyusun suatu perencanaan dan penganggaran termasuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan, kebijakan dan program yang telah dirumuskan dalam berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Adapun konsistensi dalam proses perencanaan seperti yang di kemukakan dari informan dari Bappeda yaitu :

Melihat konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra DPUTR dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, Matrik Konsolidasi terdapat dalam lampiran dari hasil matrik kosolidasi dapat diketahui terdapat inkonsistensi pada misi DPUTR terhadap misi Kota Tarakan, dari hasil interview dikarenakan faktor kapasitas SDM DPUTR, Terdapat 2 misi opd dan 4 misi Kota, 2 tujuan opd dan 7 tujuan Kota, 12 sasaran opd dan 19 sasaran kota. Visi konsisten, tujuan 2 konsisten, sasaran 7 konsisten.(Lihat Tabel 3)

Sesuai dengan hasil In dept Interview Inkonsistensi tersebut disebabkan oleh data dan informasi mengenai penyusunan renstra kurang tepat, sehingga tidak ada pemahaman tentang dalam hal visi, misi, tujuan dan sasaran. Inkonsistensi misi pada renstra DPUTR 2014 sd 2019 yang tidak sesuai dengan mekanisme penyusunan renstra yang ada dalam Pasal 272 dan 273 UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Pasal 13 permendagri 86 tahun 2017. Dalam hal ini kapasitas Sumber daya Aparatur sangat diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan demikian juga halnya

dengan sosialisasi tentang perencanaan dan penganggaran dari Pemerintah Kota Tarakan maupun Kemendagri Dalam Pasal 272 dan 273 UU No. 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan menurut Pasal 13 permendagri 86 tahun 2017 adalah Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dari dasar tersebut bahwa misi renstra tidak sesuai dengan mekanisme perencanaan menurut Pasal 272 dan 273 UU No. 23 tahun 2014 dan Pasal 13 permendagri 86 tahun 2017. Melihat matrik konsolidasi maka misi yang inkonsisten diikuti oleh tujuan dan sasaran yang inkonsisten dimana seharusnya suatu perencanaan harusnya berkesinambungan hal ini sesuai dengan pendapat Conyers & Hills yang menyatakan bahwa Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang, Mudrajad K. (2018 : 73).

Selanjutnya analisa konsistensi antara program RPJMD dengan program RKPD pada DPUTR Kota Tarakan, dalam matrik ini menyajikan konsistensi program antara 2 dokumen perencanaan daerah dengan mencocokkan konsistensi program antara program, seperti pada lampiran dengan 25 program RPJMD, 17 program RKPD dengan total program 27, muncul program baru 2, tidak diakomodir 10 program dengan jumlah program inkonsisten 12 program yang konsisten 15, dengan capaian tingkat konsistensi 56 % katagori sedang.

Melihat konsistensi dari program RPJMD dengan program pada Renstra DPUTR Kota Tarakan, dimana di dalam RPJMD Kota Tarakan terdapat 25 program, sedangkan pada Renstra PD dalam hal ini DPUTR terdapat 24 program. Dalam 25 program RPJMD dalam terakomodir 23 program dalam renstra DPUTR sementara 2 program tidak terakomodir, dengan catatan 1 program tidak ada dalam RPJMD Kota Tarakan, dengan total program sebanyak 27 program, dengan capaian tingkat konsistensi 88 % katagori sangat baik. Melihat sistem perencanaan di Indonesia

berdasarkan permendagri 86 tahun 2017, seharusnya program di Restra PD (DPUTR) haruslah ada dalam program pada RPJMD, melihat RPJMD yang merupakan dasar dari penyusunan Renstra PD.

Matrik konsolidasi antara RKPD dengan Renja DPUTR jumlah program kegiatan yang ada di RKPD sebesar 70 program kegiatan pada Renja DPUTR sebesar 106 program kegiatan. Besarnya jumlah program yang terdapat dalam Renja DPUTR, berbanding terbalik dengan jumlah program pada RKPD, padahal renja DPUTR harus mengacu pada RKPD. Adapun jumlah program dalam Renja yang tidak terdapat di dalam RKPD adalah 47 Program kegiatan (muncul program kegiatan baru), kemudian terdapat 13 program kegiatan yang tidak terakomodir di dalam Renja DPUTR, dengan total jumlah program kegiatan yang inkonsisten adalah sebanyak 60 program kegiatan, sementara jumlah program kegiatan yang konsisten sebanyak 57 program kegiatan, dengan total jumlah program kegiatan 117 program kegiatan. Melihat sistem perencanaan di Indonesia berdasarkan permendagri 86 tahun 2017, dengan capaian tingkat konsistensi 49 % kategori sangat sedang. seharusnya program di Renja PD (DPUTR) haruslah ada dalam program pada RKPD, melihat RKPD yang merupakan dasar dari penyusunan Renja PD.

Hasil analisa matrik konsolidasi, terdapat 139 program kegiatan di Renstra, 106 program kegiatan di Renja dengan total program kegiatan 117, muncul program kegiatan baru 188, tidak diakomodir 81 program kegiatan, Jumlah program kegiatan inkonsisten 130 program kegiatan dan jumlah program konsisten 58 program kegiatan, dengan capaian tingkat konsistensi 31 % kategori buruk.

Melihat matrik konsolidasi lampiran, terdapat 70 program kegiatan di RKPD, 79 program kegiatan di DPA total program kegiatan 96, muncul program kegiatan baru 26, tidak diakomodir 17 program kegiatan, Jumlah program kegiatan inkonsisten 43 program kegiatan dan jumlah program konsisten 53 program kegiatan, dengan capaian tingkat konsistensi 55 % kategori sedang.

Melihat matrik konsolidasi lampiran, terdapat 106 program kegiatan di Renja, 79 program kegiatan di DPA total program kegiatan 120, muncul program kegiatan baru 14, tidak diakomodir 17 program kegiatan, Jumlah program kegiatan inkonsisten 59 program kegiatan dan jumlah program konsisten 61 program kegiatan, dengan capaian tingkat konsistensi 51 % kategori sedang.



Dari semua hasil pembahasan matrik konsolidasi baik dari perbandingan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran maka dapat di rekapitulasi dalam tabel 4.

Dari tabel 4, dapat diketahui bahwa tingkat konsistensi tertinggi dengan predikat sangat baik yaitu terdapat pada konsistensi antara visi renstra dengan visi RPJMD, selanjutnya juga terdapat pada konsistensi antara RPJMD dengan Renstra DPUTR dengan katagori sangat baik. Untuk yang paling rendah adalah konsistensi antara misi renstra dengan misi RPJMD dengan konsistensi sangat buruk selanjutnya adalah konsistensi sasaran renstra dengan RPJMD dengan katagori buruk. Melihat konsistensi pada tingkat PD (DPUTR) konsistensi renstra dengan renja memiliki konsistensi terjelak dengan katagori buruk.

### **Faktor-faktor Penyebab Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pada DPUTR**

Menurut penelitian terdahulu Ferdinandus Diri Burin dalam jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 6 No. 2 tahun 2015 menyatakan bahwa faktor-faktor inkonsistensi berdasarkan beberapa perhitungan dengan menggunakan AHP, maka diketahui bahwa kriteria yang paling dominan atau yang paling direkomendasikan secara berturut-turut adalah:

1. Komitmen Pemimpin Daerah (0,288);
2. Kapasitas SDM (0,248);
3. Data dan Informasi (0,136);
4. Komunikasi Politik (0,128);
5. Kemampuan Keuangan Daerah (0,091);
6. Teknologi (0,085);
7. Komitmen Organisasi (0,025).

Hasil penelitian dalam jurnal Ferdinandus Diri Burin tersebut juga terdapat hasil penelitian dengan menggunakan AHP tentang alternatif kebijakan yang dilakukan masing-masing dengan urutan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Aparat .035
2. Penempatan Aparat .058
3. Taat Terhadap Regulasi .090
4. Menyiapkan Regulasi Daerah .139

5. Memperkuat Basis Data .045
6. Adopsi Teknologi .180
7. Optimalisasi Penerimaan Daerah .083
8. Efisiensi dan Efektivitas Pengeluaran Daerah .071
9. Memperkuat Kelembagaan .040
10. Komitmen Terhadap Dokumen Perencanaan .259

Dari hasil analisa dengan melihat in depth interview kekurangan proses perencanaan dan penganggaran pada DPUTR yang dapat menyebabkan inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di DPUTR menurut pendapat ke 5 informan berbeda-beda tetapi pada kesimpulannya terdapat 7 faktor kekurangan yang dapat mempengaruhi konsistensi dan inkonsistensi yaitu (1) Komitmen Pemimpin daerah dalam pelaksanaan konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran (2) Kapasitas SDM (ASN) Perencana dalam Perangkat Daerah (3) Data dan Informasi Pembangunan (4) Komunikasi Politik legislatif dan eksekutif (5) Kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan anggaran daerah (6) Teknologi Perencanaan dan penganggaran dan (7) Komitmen Organisasi terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran (PD) dan 2 faktor lagi yaitu (1) Data isu-isu strategis pembangunan yang mendukung perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran dan (2) Kebijakan Pemimpin tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran. sehingga disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsistensi dan inkonsistensi perencanaan dan penganggaran pada DPUTR dari hasil in depth interview dan berdasar penelitian terdahulu Ferdinandus Diri Burin (2015) adalah:

1. Komitmen Pemimpin daerah
2. Kapasitas SDM (ASN)
3. Data dan Informasi
4. Komunikasi Politik
5. Kemampuan keuangan daerah
6. Teknologi dan
7. Komitmen Organisasi (PD)

Dengan alternatif kebijakan adalah :

1. Penempatan aparat
2. Meningkatkan kualitas SDM

3. Memperkuat basis data isu strategis pembangunan
4. Taat terhadap regulasi
5. Optimalisasi penerimaan daerah
6. efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah
7. Adopsi teknologi
8. komitmen terhadap dokumen perencanaan

Berdasarkan perhitungan AHP berdasarkan tingkat kepentingan alternatif kebijakan yang mempengaruhi kriteria :

**Prioritas 1** : Kemampuan Keuangan Daerah memiliki alternatif kebijakan berdasarkan tingkat kepentingannya adalah (a) optimalisasi penerimaan daerah sebesar 0.40 (b) efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah sebesar 0.27 (c) Meningkatkan kualitas SDM sebesar 0.20 dan terakhir (d) Memperkuat basis data isu strategis pembangunan sebesar 0.14.

**Prioritas 2** : Komitmen Pemimpin Daerah memiliki alternatif kebijakan berdasarkan tingkat kepentingannya adalah (a) komitmen terhadap dokumen perencanaan sebesar 0.21 (b) efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah sebesar 0.15 (c) Taat terhadap regulasi sebesar 0.14 (d) Memperkuat basis data isu strategis pembangunan sebesar 0.12 (e) Optimalisasi penerimaan daerah sebesar 0.11 (f) Penempatan aparat sebesar 0.10 (g) Meningkatkan kualitas SDM sebesar 0.09 dan terakhir adopsi teknologi sebesar 0.08.

**Prioritas 3** : Komunikasi Politik memiliki alternatif kebijakan berdasarkan tingkat kepentingannya adalah (a) komitmen terhadap dokumen perencanaan sebesar 0.48 (b) Memperkuat basis data isu strategis pembangunan sebesar 0.28 terakhir (c) Taat terhadap regulasi sebesar 0.24

**Prioritas 4** : Data dan informasi alternatif kebijakan berdasarkan tingkat kepentingannya adalah (a) Memperkuat basis data isu strategis pembangunan sebesar 0.54 (b) Optimalisasi penerimaan daerah sebesar 0.25 terakhir (c) Adopsi teknologi sebesar 0.20

**Prioritas 5** : Kapasitas SDM alternatif kebijakan berdasarkan tingkat kepentingannya adalah (a) Meningkatkan kualitas SDM sebesar 0.64 dan terakhir (b) Penempatan aparat sebesar 0.36.

**Prioritas 6** : Komitmen Organisasi alternatif kebijakan berdasarkan tingkat kepentingannya adalah (a) komitmen terhadap dokumen perencanaan sebesar 0.28 (b) Taat terhadap regulasi sebesar 0.25 (c) efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah sebesar 0.17 (d) Optimalisasi penerimaan daerah sebesar 0.16 dan terakhir adopsi teknologi sebesar 0.14.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Temuan penelitian dari hasil matrik konsolidasi perencanaan dan Penganggaran (MKPP) pada perencanaan pembangunan daerah ditemukan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Tahun 2018 itu **sedang**. Semua dokumen perencanaan dan penganggaran sangat beresiko inkonsisten, baik RPJMD-RKPD, RPJMD-Renstra, Renja-RKPD, Renstra-Renja, RKPD-DPA maupun Renja-DPA. Meski demikian, dokumen yang perlu menjadi prioritas perhatian adalah **Renstra-Renja**, karena terbukti memiliki tingkat konsistensi paling rendah. Berikut ini adalah rincian dari hasil analisa pembahasan sesuai permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Dari analisis konsistensi visi DPUTR sangat baik, konsistensi misi sangat buruk, konsistensi tujuan buruk serta sasaran konsistensi buruk, selanjutnya konsistensi antara Program RPJMD dengan RKPD urusan DPUTR konsistensi sedang.
2. Konsistensi RPJMD dengan Renstra DPUTR sangat baik, konsistensi ini diperlukan agar DPUTR tidak keluar dari perencanaan Daerah sehingga visi dan misi Kota dapat tercapai melalui program-program DPUTR.
3. Konsistensi RKPD dengan Renja DPUTR sedang, Konsistensi diperlukan agar renja DPUTR tidak keluar dari perencanaan daerah sehingga visi dan misi Kota dapat tercapai.
4. Analisa konsistensi antara Renstra dengan Renja DPUTR katagori buruk selanjutnya konsistensi RKPD dengan Renja sedang dan tingkat konsistensi antara Renja dengan DPA DPUTR sedang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi perencanaan dan penganggaran DPUTR Kota Tarakan tahun 2018 adalah :

Komitmen Pemimpin berupa kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, Kapasitas SDM (ASN) Perencana dalam Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, Data dan Informasi Pembangunan yang berupa isu-isu strategis pembangunan yang mendukung perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, Komunikasi Politik legislatif dan eksekutif tentang komitmen konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, Kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan anggaran daerah dalam hal ini locus DPUTR, Teknologi yang mendukung konsistensi Perencanaan dan penganggaran dan Komitmen Organisasi terhadap konsistensi perencanaan dan penganggaran (PD)

### Saran

Konsistensi perencanaan dan penganggaran diperlukan agar pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah tercapai dengan kebijakan adalah

1. **Kebijakan Pertama** : meningkatkan kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara (1) optimalisasi penerimaan daerah (2) efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah sebesar (3) Meningkatkan kualitas SDM dan (d) Memperkuat basis data isu strategis pembangunan
2. **Kebijakan kedua** : komitmen pemimpin daerah dapat dilakukan dengan (1) meningkatkan komitmen terhadap dokumen perencanaan (2) efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah sebesar (3) Taat terhadap regulasi (4) Memperkuat basis data isu strategis pembangunan (5) Optimalisasi penerimaan daerah (6) Penempatan aparat (7) Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan dan terakhir (8) adopsi teknologi Perencanaan dan penganggaran.
3. **Kebijakan ketiga** : Komunikasi Politik legislatif dan eksekutif maka perlu dilakukan (1) mempunyai komitmen terhadap dokumen konsistensi perencanaan (2) Memperkuat basis data isu strategis pembangunan dan (3) Taat terhadap regulasi tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran.
4. **Kebijakan keempat** : Perlunya data dan informasi yang mendukung supaya dokumen perencanaan tepat sasaran dengan cara (1) Memperkuat basis data isu strategis pembangunan (2) Optimalisasi penerimaan daerah (3) Adopsi teknologi perencanaan dan penganggaran

5. **Kebijakan kelima** : meningkatkan kapasitas SDM Perencana dan penganggaran dilakukan dengan cara (1) Meningkatkan kualitas SDM perencana dan (b) Penempatan aparat perencana yang tepat.
6. **Kebijakan keenam** Perlunya komitmen Organisasi terkait konsistensi perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan cara (1) komitmen terhadap konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran (2) Taat terhadap regulasi konsistensi perencanaan dan penganggaran (3) efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah (4) Optimalisasi penerimaan daerah (5)adopsi teknologi perencanaan dan penganggaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Azuar Juliandi, Irfan, Sapriyal Manurung ,2014, Metodologi Penelitian Bisnis Konsep Dan Aplikasi, UMSUpress, Medan
- Anggi, R. (2016). Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Apip Supriadi, dkk. (2018). Analytical Hierarchy Process (AHP). Yogyakarta : Deepublish.
- Bagdja, M. (2011). Pembangunan Ekonomi Wilayah. Bandung : UNPAD PRESS.
- Bilmar, P. (2018). Simposium Nasional Keuangan Negara (Implementasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Kpjm) Di Indonesia), Bogor Indonesia : Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
- Hamzan Wadi, 2020, Sistem Pendukung Keputusan Metode Analytic Hierarchy Process dengan PHP & MySQL, Turida Publisher
- Imam Hardjanto. Teori Pembangunan. Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press)
- Kadarsah, Suryadi dan M Ali Ramdani.(1998). Sistem Pendukung Keputusan. PT Remaja Rasdakarya, Bandung.
- Muchlis, H. & Siti, I. (2016). Metodologi Penelitian Administrasi. Tangerang : Selatan Universitas Terbuka.
- Mudrajad, K. (2018). Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nurkholis dan Moh. Khusaini. (2018). Penganggaran Sektor Publik. Malang : Tim UB Press.
- Oekan, S. A. dan Dede, M. (2019). Isu-isu pembangunan pengantar teoritis. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono (2003), Statistika untuk Penelitian, CV. Alfabeta. Bandung
- T. L. Saaty and L. G. Vargas, Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process, International Series in Operations Research & Management Science 175, DOI: 10.1007/978-1-4614-3597-6\_1, Springer Science+Business Media New York 2012

Taufiqurokhan. (2014). Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan). Jakarta : Fisipol Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Yohandarwati, A. (2013). Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi. Jakarta : Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor, Bappenas.

### **Jurnal**

Agus, S. and Dyah, M. (2017). Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Daerah, *Journal of Governance And Public Policy*, Vol.4 No.1.

Alferus Sanuari, Yundhy Hafizrianda, Siti Rofingatun (2015), Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Di Kabupaten Pegunungan Bintang studi Kasus Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Tahun 2013-2015, *Jurnal Keuda* Vol. 2 No. 2

Ferdinandus, D. B., Candra, F. A., David, K. (2015), Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Daerah *Jurnal Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol. 6 No. 2.

Meri Darlina, Yannizar, Siti Hodijah (2016), Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 3 No. 4.

Nofriyanto Triyono, Lintje Kalangi, Stanly Alexander (2019), Evaluasi Konsistensi Perencanaan Penganggaran Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA*, Vol.7 No.3 Juli 2019

Zulkarnaen, W., Bagianto, A., Sabar, & Heriansyah, D. (2020). Management accounting as an instrument of financial fraud mitigation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(3), 2471–2491. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR201894>

### **Tesis**

Ramadhiani, F. (2012). Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Bidang Kesehatan Kota Lubuklinggau Tahun 2010. Jakarta : Tugas akhir Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik.

Selfina, K. (2007). Konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Jayapura. Makassar : Tesis Program Magister Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

**TABEL**

**Tabel 1.**  
**Matrik Konsolidasi antara DPA DPUTR dan RENJA DPUTR Kota Tarakan 2018**

NO	KETERANGAN	TOTAL
1	2	3
1	Jumlah Program Kegiatan RENJA DPUTR	348
2	Jumlah Program Kegiatan DPA DPUTR	79
3	Jumlah Program DPA = RENJA	44
4	Jumlah Program DPA ≠ RENJA	35
Prosentase Konsistensi RKPD dalam RPJMD		55.70%
Prosentase Inkonsistensi RKPD dalam RPJMD		44.30%

Sumber : Bappeda Kota Tarakan 2018 (data diolah)

**Tabel 2**  
**Presentase Porsi Anggaran OPD Kota Tarakan tahun 2018**

No	INSTANSI	PROSENTASE ANGGARAN
1	2	3
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	29.38%
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.05%
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.55%
4	Dinas Kesehatan	5.58%
5	Sekretariat Daerah	3.57%

Sumber : Bappeda Kota Tarakan (Data diolah)

**Tabel 3**  
**Perhitungan Matrik Konsolidasi**

No	Keterangan	Jumlah		Jumlah konsisten	Konsistensi
		Renstra	RPJMD		
1	Visi	1	1	1	100%
2	Misi	2	4	0	0%
3	Tujuan	2	7	2	29%
4	Total Tujuan	7			



7	Sasaran	12	19	7	28%
8	Total sasaran	25			

Sumber : Data diolah.

**Tabel 4**  
**Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**

NO	Keterangan	Tingkat Konsistensi	Predikat
1	Visi Renstra vs Visi RPJMD	100%	Sangat baik
2	Misi Renstra vs Misi RPJMD	0%	Sangat buruk
3	Tujuan Renstra vs Tujuan RPJMD	29%	Buruk
4	Sasaran Renstra vs Sasaran Rpjmd	28%	Buruk
5	RPJMD vs RKPD urusan DPUTR	56%	Sedang
6	RPJMD vs Renstra urusan DPUTR	88%	Sangat baik
7	Renja Vs RKPD urusan DPUTR	49%	Sedang
8	Renstra Vs Renja urusan DPUTR	31%	Buruk
9	RKPD vs DPA urusan DPUTR	55%	Sedang
10	Renja Vs DPA urusan DPUTR	51%	Sedang
Rata-rata capaian		48.62%	SEDANG

Sumber : Data diolah.